

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

Todaro & Smith (2015) menjelaskan bahwa pembangunan dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan lembaga nasional, serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan dan penanggulangan kemiskinan. Lebih lanjut, Todara & Smith (2015) menjelaskan tiga tujuan inti pembangunan yaitu:

- a) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai kebutuhan yang pokok, seperti pangan sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan
- b) Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
- c) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghambat dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau bangsa-bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Laju pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Bruto*) atau GDP. Apabila pertambahan GDP/GNP lebih rendah dibandingkan pertambahan penduduk maka pendapatan per kapita akan tetap sama atau cenderung menurun. Ini berarti bahwa pertambahan GDP/GNP tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan ekonomi.

2.1.2 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru (Lincoln Arsyad, 1997). Dalam pembangunan ekonomi daerah diperlukan campur tangan pemerintah. Apabila pembangunan daerah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar maka pembangunan dan hasilnya tidak dapat dirasakan oleh seluruh daerah secara merata.

Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah, mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan daerah. Memusatnya ekspansi ekonomi di suatu daerah disebabkan berbagai hal, misalnya kondisi dan situasi alamiah yang ada, letak geografis, dan sebagainya. Ekspansi ekonomi suatu daerah akan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, karena tenaga kerja yang ada, modal, perdagangan, akan pindah ke daerah yang melakukan ekspansi tersebut seperti yang diungkapkan Myrdal dalam Jhingan (1993) mengenai dampak balik

pada suatu daerah. Oleh karena itu, apabila proses perekonomian diserahkan kepada mekanisme pasar akan membawa akibat-akibat yang kurang menguntungkan baik bagi daerah-daerah yang terbelakang maupun daerah-daerah maju dan pada akhirnya justru dapat mengganggu kestabilan ekonomi negara secara keseluruhan.

2.1.3 Teori Myrdal Mengenai Dampak Balik

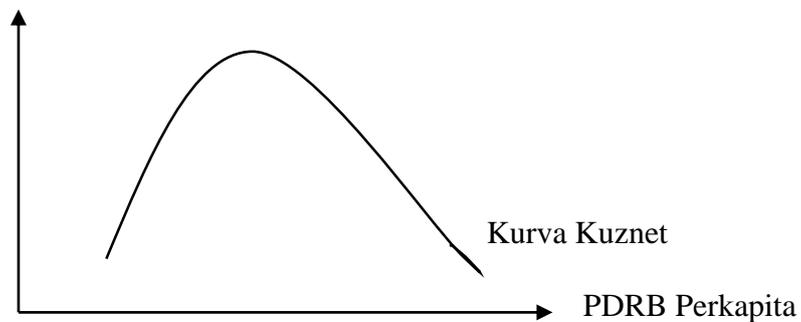
Dampak balik (*backwash effect*) yaitu sebagai semua perubahan yang bersifat merugikan dari ekspansi suatu ekonomi di suatu tempat karena sebab-sebab di luar tempat itu. Dalam istilah ini Myrdal memasukkan dampak migrasi, perpindahan modal, dan perdagangan serta keseluruhan dampak yang timbul dari proses sebab-musabab sirkuler antara faktor-faktor baik non ekonomi maupun ekonomi. Dampak sebar (*spread effect*) merujuk pada momentum pembangunan yang menyebar secara sentrifugal dari pusat pengembangan ekonomi ke wilayah-wilayah lainnya. Sebab utama ketimpangan regional menurut Myrdal adalah kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara terbelakang (Jhingan,1993).

Menurut Myrdal dalam M.L Jhingan (1993), berpendapat bahwa pembangunan ekonomi menghasilkan suatu proses menyebabkan sirkuler yang membuat si kaya mendapat keuntungan semakin banyak, dan mereka yang tertinggal di belakang menjadi semakin terhambat. Dampak balik (*backwash effect*) cenderung membesar dan dampak sebar (*spread effect*) semakin mengecil. Semakin kumulatif kecenderungan ini semakin memperburuk ketimpangan internasional dan menyebabkan ketimpangan regional di negara-negara terbelakang.

2.1.4 Hipotesis Kuznets

Simon Kuznets (1995) dalam Kuncoro (2006) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata.

Koefisien Gini



Gambar 2.1 Kurva Kuznet

Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro,2004).

Profesor Kuznets mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir semua negara yang sekarang maju sebagai berikut :

1. Tingkat pertumbuhan output per kapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
2. Tingkat kenaikan produktivitas faktor total yang tinggi.
3. Tingkat transformasi struktural yang ekonomi yang tinggi.
4. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.
5. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.
6. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia.

Dua Faktor yang pertama lazim disebut sebagai variabel-variabel ekonomi agregat. Sedangkan nomor tiga dan empat biasa disebut variabel-variabel transformasi struktural. Adapun dua faktor yang terakhir disebut sebagai variabel-variabel yang mempengaruhi penyebaran pertumbuhan ekonomi secara internasional (Todaro, 2004).

2.1.5 Ketimpangan Wilayah

Kesenjangan atau ketimpangan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, hal ini tercermin dari adanya perbedaan pendapatan (Baidhawry, 2015). Ketimpangan distribusi pendapatan terjadi karena kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara-negara berkembang (Jhingan, 1999).

Menurut Syafrizal (2008), ketimpangan yang terjadi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah, sehingga tiap daerah mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam proses pembangunan. Perbedaan wilayah ini yang menimbulkan adanya wilayah maju dan wilayah terbelakang. Ketimpangan atau disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu di setiap daerah biasanya terdapat istilah daerah maju dan daerah terbelakang (Andiny & Mandasari, 2017).

Menurut Alam & Tjahya (2007) menyatakan bahwa ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut.

North (1955) memunculkan ketimpangan antar wilayah dalam analisisnya tentang teori pertumbuhan Neo Klasik. Dalam teori ini dimunculkan sebuah prediksi hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa tersebut dikenal sebagai hipotesa Neo Klasik. Menurut hipotesa Neo Klasik, pada awal proses

pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan cenderung mengalami peningkatan terus-menerus. Hal ini akan terus terjadi sehingga ketimpangan mencapai titik puncak. Apabila proses pembangunan berlanjut, maka ketimpangan pembangunan akan mengalami penurunan. Berdasarkan hipotesa ini, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi pada negara yang sedang berkembang, dan akan terjadi sebaliknya pada negara yang maju. Dengan kata lain kurva ketimpangan pembangunan berbentuk kurva U-terbalik.

Kebenaran hipotesa Neo Klasik ini diuji oleh Williamson (2018) melalui studi ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan sedang berkembang menggunakan data *time series* dan *cross section*. Hasilnya adalah hipotesa Neo Klasik terbukti benar secara empirik. Berarti proses pembangunan suatu negara tidak langsung dapat menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah, akan tetapi pada tahap pertama justru terjadi hal yang sebaliknya (Syafriзал, 2012:102). Menurut Williamson hubungan antar disparitas regional dengan tingkat pembangunan ekonomi, dengan menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan ekonomi yang sedang berkembang, ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu.

Terjadinya ketimpangan antar wilayah juga dijelaskan Myrdal, yaitu membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya disekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskannya menggunakan *spread effect* dan *backwash effect* sebagai pengaruh penjalaran dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. *Spread effect* artinya sebagai suatu pengaruh

yang mendatangkan keuntungan, mencakup aliran kegiatan-kegiatan investasi dipusat pertumbuhan ke daerah sekitar. *Backwash effect* artinya sebagai pengaruh yang mendatangkan kerugian, mencakup aliran manusia dari wilayah sekitar atau pinggiran termasuk aliran modal pembangunan bagi wilayah pinggiran yang sebenarnya diperlukan untuk mengimbangi perkembangan wilayah inti.

Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah. Adanya ketimpangan, akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu daerah-daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Akan tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah. Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro,2004).

Menurut Sjafrizal (2008), ketimpangan pembangunan wilayah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Perbedaan sumber daya alam
2. Kondisi demografis
3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa
4. Konsentrasi kegiatan ekonomi
5. Alokasi dana pembangunan antar wilayah

Bahkan kebijakan yang dilakukan oleh suatu daerah dapat pula mempengaruhi ketimpangan pembangunan regional. Oleh karena itu untuk menghitung tingkat ketimpangan wilayah digunakan beberapa metode yaitu Indeks Williamson, Indeks Entrophy Theil dan Ketimpangan Berdasarkan Konsep PDRB per Kapita Relatif.

2.1.5.1 Indeks Williamson

Tingkat ketimpangan antar wilayah dapat diketahui dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson. Ketimpangan Williamson dapat dihitung menggunakan formula sebagai berikut (Syafriзал, 2008):

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{Y}$$

Dimana :

Y_i = PDRB perkapita daerah i

Y = PDRB perkapita rata-rata seluruh daerah

f_i = Jumlah penduduk daerah i

n = Jumlah penduduk seluruh daerah

Indeks Williamson mempunyai nilai antara 0-1, dimana semakin mendekati nol artinya maka menunjukkan wilayah tersebut semakin tidak timpang, dan apabila mendekati satu maka wilayah tersebut semakin timpang.

2.1.5.2 Indeks Entrophy Theil

Ying dalam Kuncoro (2006) menjelaskan untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto Provinsi, juga menggunakan indeks ketimpangan regional Theil. Indeks ketimpangan regional Theil tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antarwilayah atau regional. Indeks Entrophy Theil memungkinkan untuk membuat perbandingan selama kurun waktu tertentu. Indeks ini juga dapat menyediakan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil, yang pertama akan digunakan untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu dan yang kedua juga penting ketika kita mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan/ketimpangan spasial. Adapun rumus untuk menghitung Indeks Entrophy Theil adalah sebagai berikut (Kuncoro : 2004) :

$$I(y) = \sum (y_j/Y) \times \log[(y_j/Y)/(x_j/X)]$$

Dimana:

I (y) : Indeks Entrophhi Theil

y_j : PDRB per kapita Kabupaten/Kota

Y : Rata-rata PDRB per kapita

x_j : Jumlah penduduk Kabupaten/Kota

X : Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat

2.1.6 Investasi

Investasi merupakan perpindahan modal dimana akan cenderung meningkatkan ketimpangan. Di wilayah yang maju, permintaan yang meningkat akan merangsang pertumbuhan investasi yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Investasi hanya akan terjadi pada lingkup tertentu sehingga akan menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang (Myrdal dalam Jhingan, 1993). Kelangkaan modal ini yang akan menyebabkan ketimpangan antara wilayah yang maju dengan wilayah terbelakang. Menurut Sadono (1994), banyaknya keuntungan yang akan diperoleh besar peranannya dalam menentukan tingkat investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Disamping ditentukan oleh harapan masa depan untuk memperoleh keuntungan, maka beberapa faktor juga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan investasi dalam perekonomian. Faktor-faktor utama dalam menentukan investasi yaitu:

- 1) Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh.
- 2) Suku bunga.
- 3) Ramalan keadaan ekonomi masa depan.
- 4) Kemajuan teknologi
- 5) Tingkat pendapatan nasional dan perubahannya.
- 6) Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan.

Investasi terbagi menjadi dua yaitu investasi yang dilakukan oleh swasta dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Investasi yang dilakukan oleh swasta

dibagi menjadi dua yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanaman Modal Dalam Negeri yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha dalam negeri yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan menggunakan modal dalam negeri. Menurut Krugman (2005), yang dimaksud dengan FDI atau PMA yaitu arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya ke negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumberdaya, tetapi juga pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri.

Investasi asing (PMA) merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, penanaman modal asing diartikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya atau yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri dengan tujuan antara lain:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- 2) Menciptakan lapangan kerja.
- 3) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan daya saing dunia usaha dalam negeri
- 5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
- 6) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.

- 7) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2.1.6.1 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Investasi

Investasi merupakan salah satu variabel yang penting dalam sebuah perekonomian. Ada beberapa hal yang mempengaruhi investasi, yaitu :

- 1) Pendapatan Perkapita
- 2) Tren
- 3) Situasi Politik dan Keamanan
- 4) Situasi Industri dan Ekonomi
- 5) Kondisi Sarana dan Prasarana yang Tersedia

2.1.6.2 Hubungan Antara Investasi Dengan Ketimpangan Antar Wilayah

Investasi berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Keadaan demikian dapat ditunjukkan dengan banyaknya investasi pada suatu wilayah maka akan meningkatkan output yang dihasilkan sehingga nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Myrdal (Jhingan, 1993), investasi akan cenderung menambah ketidakmerataan. Pada wilayah yang sedang berkembang, permintaan barang dan jasa maka akan mendorong naiknya investasi yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan pada daerah tersebut, kemudian keadaan sebaliknya yaitu pada wilayah yang kurang berkembang, investasi akan

cenderung rendah karena pendapatan masyarakatnya juga rendah. Kekuatan pasar mempunyai peran terpenting dalam menarik investasi swasta ke suatu daerah dengan keuntungan yang dimiliki oleh daerah tersebut (Syafrizal, 2008).

2.1.7 Aglomerasi

Menurut Mudrajad Kuncoro (2002), aglomerasi yaitu konsentrasi spasial dari aktifitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan yang diakibatkan adanya lokasi saling berdekatan (*economies of proximity*) yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja, dan konsumen untuk menekan biaya-biaya, seperti biaya transportasi, informasi, dan komunikasi. Kekuatan aglomerasi dan deaglomerasi dapat menjelaskan terjadinya konsentrasi dan dekonsentrasi industri. Ada tiga manfaat yang ditimbulkan oleh kegiatan di atas, yaitu : penghematan skala (*scale economies*), penghematan lokasi (*localization economies*), dan penghematan urbanisasi (*urbanisation economies*).

Aglomerasi menggambarkan konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Aglomerasi ini diukur menggunakan proksi yang dipakai dalam penelitian Jaime Bonet (2006) yang mendasarkan ukuran aglomerasi pada aglomerasi produksi yang dihitung dari share PDRB wilayah terhadap total PDRB. Bila ditulis secara matematis sebagai berikut :

$$Ag = \frac{PDRB_{kabupaten/kota}}{PDRB_{JawaBarat}} \times 100\%$$

Dimana :

Ag = Aglomerasi

$PDRB_i$ = PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten/Kota
(Rupiah)

$PDRB_{tot}$ = Total PDRB atau PDB Atas Dasar Harga Konstan 2000
Provinsi Jawa Barat (Rupiah)

Konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah yang tinggi akan dapat mendorong meningkatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah karena proses pembangunan daerah yang cepat hanya akan terjadi pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi. Sedangkan konsentrasi ekonomi yang rendah akan menghambat proses pembangunan. Oleh karena itu ketidakmerataan akan menimbulkan ketimpangan dalam proses pembangunan antar wilayah

2.1.7.1 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Aglomerasi

Aglomerasi merupakan faktor lokasi yang penting, baik berupa pengelompokan industri, perumahan, pemusatan pertokoan di pusat perbelanjaan, sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi ekonomis maupun kepuasan sosial, hal itu disebabkan adanya pemusatan kegiatan manusia di suatu lokasi tertentu. Menurut Kuncoro (2002) pemusatan aktivitas ekonomi atau terkonsentrasinya ekonomi secara spasial karena adanya penghematan akibat lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*) kegiatan dari perusahaan, pekerja, dan konsumen, konsep aglomerasi ini juga berkaitan dengan konsentrasi spasial penduduk. Adapun faktor yang dominan mempengaruhi aglomerasinya meliputi pendapatan, sumber daya

manusia dan penduduk. Hasil penelitian di Istanbul mengungkapkan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap aglomerasi (Alkay & Hewings, 2012).

2.1.7.2 Hubungan Aglomerasi Dengan Ketimpangan Antar Wilayah

Menurut Jamie Bonet (2006), aglomerasi yaitu pemusatan aktifitas produksi digunakan sebagai salah satu variabel yang digunakan untuk mengetahui ketimpangan antar wilayah. Aglomerasi produksi dapat mempengaruhi kesenjangan wilayah secara langsung, yaitu pada saat terjadinya hambatan mobilitas tenaga kerja antar wilayah, atau saat terjadi surplus tenaga kerja dalam perekonomian. Aglomerasi dapat diukur dengan beberapa cara, pertama adalah dengan menggunakan proporsi jumlah penduduk perkotaan dalam suatu provinsi terhadap jumlah penduduk provinsi tersebut dan yang kedua adalah dengan menggunakan konsep aglomerasi produksi (Jamie Bonet, 2006).

2.1.8 Tingkat Pengangguran

Dalam pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, pengangguran merupakan seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara efektif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh yang diinginkannya. Menurut BPS, pengangguran yaitu bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja) atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak

mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Menurut Sadono (2002), pengangguran dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, sebagai berikut:

- a) Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.
- b) Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian
- c) Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat.

Berdasarkan cirinya, pengangguran dibedakan menjadi empat, yaitu sebagai berikut:

- a) Pengangguran terbuka, yaitu pengangguran yang terjadi karena penambahan lapangan kerja lebih rendah daripada penambahan pencari kerja. Efeknya bagi perekonomian yaitu akan semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Pengangguran terbuka dapat juga sebagai wujud dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan suatu industri.
- b) Pengangguran musiman, yaitu keadaan seseorang menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek. Pengangguran ini

biasanya terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur, dan pada musim kemarau petani juga tidak dapat mengerjakan sawahnya. Pengangguran seperti ini yang disebut sebagai pengangguran musiman.

- c) Pengangguran tersembunyi, yaitu pengangguran yang terjadi karena jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih besar dari yang sebenarnya diperlukan agar dapat melakukan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contohnya adalah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.
- d) Setengah menganggur, yaitu pekerja yang jam kerjanya dibawah jam kerja normal (hanya 1-4 jam sehari atau 1-2 hari seminggu). Pada negara-negara yang berkembang migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat, hingga sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagian terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu dan ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak juga bekerja penuh waktu. Pekerja yang seperti ini disebut underemployed, dan jenis penganggurannya disebut underemployment.

2.1.8.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran

Pengangguran terjadi karena pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dari pertumbuhan lapangan pekerjaan yang ada. Pengangguran merupakan salah satu indikator penting dibidang ketenagakerjaan, dimana tingkat pengangguran dapat mengukur sejauh mana angkatan kerja mampu diserap oleh lapangan kerja yang ada. Pengangguran yang tinggi dapat menjadi sumber utama kemiskinan, dapat memicu kriminalitas yang tinggi serta dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang (Artriyani, 2013). Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka diantaranya faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka adalah pertumbuhan ekonomi, upah, inflasi, dan investasi.

2.1.8.2 Hubungan Antara Tingkat Pengangguran dengan Ketimpangan antar Wilayah

Kondisi demografis dalam suatu wilayah yaitu meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur dari kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan yang dimiliki masyarakat daerah yang bersangkutan. Kondisi demografis berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat dalam suatu daerah. Kondisi demografis yang baik cenderung akan meningkatkan produktivitas kerja, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tingkat pengangguran yang tinggi nantinya akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas suatu wilayah, sehingga akan menyebabkan produktivitas suatu wilayah tidak optimal dan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut tertinggal

dengan wilayah lainnya. Melihat kondisi demografis dari sisi tingkat pengangguran di suatu daerah, tingkat pengangguran yang tinggi akan menyebabkan ketimpangan yang tinggi pula (Syafrizal, 2008).

2.1.9 Infrastruktur

Infrastruktur merupakan sarana prasarana yang sangat strategis sebagai mobilitas penduduk untuk menghubungkan suatu daerah ke daerah lain, serta peran yang penting yaitu untuk memperlancar distribusi barang dan faktor produksi antar daerah sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi yang selanjutnya akan mempercepat peningkatan aktivitas ekonomi (Krismanti, 2021). Pembangunan infrastruktur yang baik akan menjamin efisiensi, memperlancar pergerakan barang dan jasa, dan meningkatkan nilai tambah perekonomian. Dengan begitu suatu daerah bisa menjamin kemakmuran masyarakatnya, produktivitas di suatu daerah bisa meningkat dan para investor akan berinvestasi di daerah.

Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti jalan, listrik, irigasi/pengairan, transportasi, telekomunikasi, air dan sebagainya. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Ketidakcukupan infrastruktur merupakan salah satu kunci terjadinya hambatan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan mempunyai dampak kuat terhadap pertumbuhan ekonomi (Suparmoko, 2020).

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional dan regional. Infrastruktur juga mempunyai peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu Negara maupun daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Inilah yang menyebabkan pembangunan infrastruktur menjadi pondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi (Suratno dan Sumadiasa, 2016).

Fungsi dari infrastruktur dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa fungsi dan tujuan dari penyediaan infrastruktur ialah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga dapat menyejahterakan masyarakat, serta dapat meningkatkan daya saing yang dimiliki Indonesia dalam menghadapi persaingan global.

Berdasarkan pengertian diatas maka fungsi utama infrastruktur yaitu (Arsyad, 2010):

1. Memudahkan proses pelaksanaan pekerjaan sehingga bisa menghemat banyak waktu.
2. Dapat meningkatkan produktifitas baik jasa dan barang, serta hasil kerja lebih terjamin dan berkualitas.
3. Lebih sederhana/memudahkan para pelaku/pengguna.
4. Susunan ketepatan stabilitas para pekerja lebih terjamin, dan menimbulkan rasa nyaman bagi setiap orang-orang yang berkepentingan.

5. Membangkitkan rasa puas bagi orang-orang yang berkepentingan yang menggunakannya.

Prioritas pada pembangunan nasional ditujukan pada pembangunan infrastruktur pada koridor-koridor ekonomi yang memiliki daya dukung dan gerak yang sangat efektif dan sudah memiliki daya dukung dan gerak yang efektif dan memiliki manfaat yang tinggi serta berantai terhadap daya tumbuh ekonomi keadilan yang bersosial.

2.1.9.1 Hubungan Antara Infrastruktur Dengan Ketimpangan Antar Wilayah

Pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pemerataan ekonomi Indonesia adalah positif. Ketika pembangunan infrastruktur dengan indikator jalan mengalami kenaikan, maka akan diikuti oleh peningkatan indikator pendapatan per kapita, namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada pemerataan ekonomi.

Berdasarkan teori Stone maupun Grigg menyebutkan bahwa infrastruktur memiliki pengaruh pada aspek sosial, antara lain mampu meningkatkan pemerataan, sedangkan hasil pada penelitian ini menunjukkan pembangunan infrastruktur tidak berpengaruh terhadap pemerataan ekonomi dan berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Lopez dalam Sari (2011) juga menyatakan bahwa perbaikan di sektor infrastruktur dapat mendorong pemerataan yang progresif, artinya pembangunan infrastruktur seharusnya dapat mempengaruhi pemerataan ekonomi negara. Hasil pada penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maryaningsih, et all (2014) yang menyatakan bahwa

walaupun pembangunan infrastruktur berpengaruh signifikan dalam meningkatkan pendapatan per kapita, namun pemerata.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk memperkaya perspektif penelitian ini, selain kajian teoritis yang disajikan diatas, penulis juga mengkaji beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian ini berdasarkan atas kesamaan pembahasan tentang suatu ketimpang antar wilayah.

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan, Metode dan Hasil Penelitian
1.	Silviana, Jong Tallo (2020): “Analisis Ketimpangan dan Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat”	<p>Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketimpangan dan faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan antar kabupakten/kota di Provinsi Jawa Barat.</p> <p>Metode : Indeks Williamson, Tipologi Klassen</p> <p>Hasil Penelitian : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis ketimpangan terbesar yang terjadi di Provinsi Jawa Barat yaitu terjadi di wilayah Tasikmalaya, wilayah Cianjur, Garut, Cirebon dan Kuningan. Sementara wilayah dengan tingkat ketimpangan terendah berada di wilayah Kota Bandung.</p>
2.	FA Asy’ariati, Wahyudi, Murwati, Nirmala, Ratih (2022): “Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung”	<p>Tujuan : Untuk menganalisis pengaruh apa saja yang dapat menyebabkan ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung.</p> <p>Metode : Regresi Random Effects Model, Indeks Williamson</p> <p>Hasil Penelitian : Hasil dari penelitian ini, rata-rata pengeluaran makanan dan jumlah penduduk miskin mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ketimpangan wilayah pada kabupaten/kota di Lampung, sedangkan rata-rata pengeluaran non makanan dan rata-rata lamanya sekolah tidak memberikan pengaruh yang signifikan.</p>

3.	Retty Yusniar (2019): “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2016”	<p>Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pendapatan daerah, angkatan kerja dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2010-2016.</p> <p>Metode : Indeks Williamson, Regresi Panel Data</p> <p>Hasil Penelitian : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Angkatan Kerja menunjukkan pengaruh yang positif dan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan regional. Variabel pendapatan daerah mempunyai pengaruh negatif namun berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan wilayah, sedangkan variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh ketimpangan wilayah di Sulawesi Selatan.</p>
4.	Rajab, Kamarudin (2021): “Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Wilayah dan Tingkat Kemiskinan”	<p>Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi, ketimpangan wilayah dan tingkat kemiskinan yang ada pasca pemekaran wilayah</p> <p>Metode : Indeks Williamson, Regresi Panel Data</p> <p>Hasil Penelitian : Hasil penelitian ini menunjukan pertumbuhan ekonomi tertinggi diperoleh pada tahun 2010 dan tingkat terendah berada pada tahun 2020. Sedangkan untuk ketimpangan wilayah nya pada tahun 2013-2018 didapatkan nilai indeks antara 0,35 sampai dengan 0,5 termasuk ke dalam kategori sedang. Dan untuk tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat nila kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2020 karena mencapai tingkat kemiskinan sebesar 20,74%.</p>
5.	Linda Tustiana Puspitawati (2013): “Analisis Perbandingan Faktor-Faktor	<p>Tujuan : Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbandingan faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan antar kabupaten/kota dengan menganalisis</p>

	<p>Penyebab Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsapur”</p>	<p>dari segi kondisi sektoral, karakteristik pertumbuhan ekonomi, dan kondisi fasilitas sosial dan ekonomi setiap kabupaten/kota di Kawasan Kedungsapur.</p> <p>Metode : Location Quotient, Shift Share, Tipologi Klassen dan Skalogram</p> <p>Hasil Penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kabupaten/kota yang memiliki sektor basis adalah sektor pertanian memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, sedangkan sebagian besar kabupaten/kota di Kawasan Kedungsapur memiliki sektor basis pada sektor pertanian.</p>
6.	<p>Jefri Tipika (2015): “Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku”</p>	<p>Tujuan : Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pola dan struktur ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Maluku, untuk mengetahui pengaruh tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku, dan untuk mengetahui apakah hipotesis Kuznets tentang “U-terbalik” berlaku di Provinsi Maluku.</p> <p>Metode : Tipologi Klassen, Indeks Williamson, Korelasi Person</p> <p>Hasil Penelitian : Hasil penelitian ini menunjukan selama tahun 2010-2014 angka ketimpangan di Provinsi Maluku dihitung dengan Indeks Williamson mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dan untuk Hipotesis Kuznets tentang kurva U-terbalik di Provinsi Maluku tidak berlaku pada periode penelitian (2010-2014).</p>

2.3 Kerangka Pemikiran

Pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan secara optimal. Setiap daerah pada dasarnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang berbeda antar wilayah satu dengan yang lainnya. Perbedaan pertumbuhan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan potensi yang ada pada tiap daerah seperti sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya. Sehingga mengakibatkan adanya ketimpangan antar wilayah yang pada akhirnya akan menimbulkan terjadinya disparitas pendapatan dan merupakan konsekuensi dari proses pertumbuhan ekonomi antar wilayah.

Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota menggunakan indeks Williamson. Untuk mengetahui tingkat ketimpangan di Provinsi Jawa Barat maka perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah. Faktor-faktor yang digunakan yaitu investasi, aglomerasi, tingkat pengangguran dan infrastruktur.

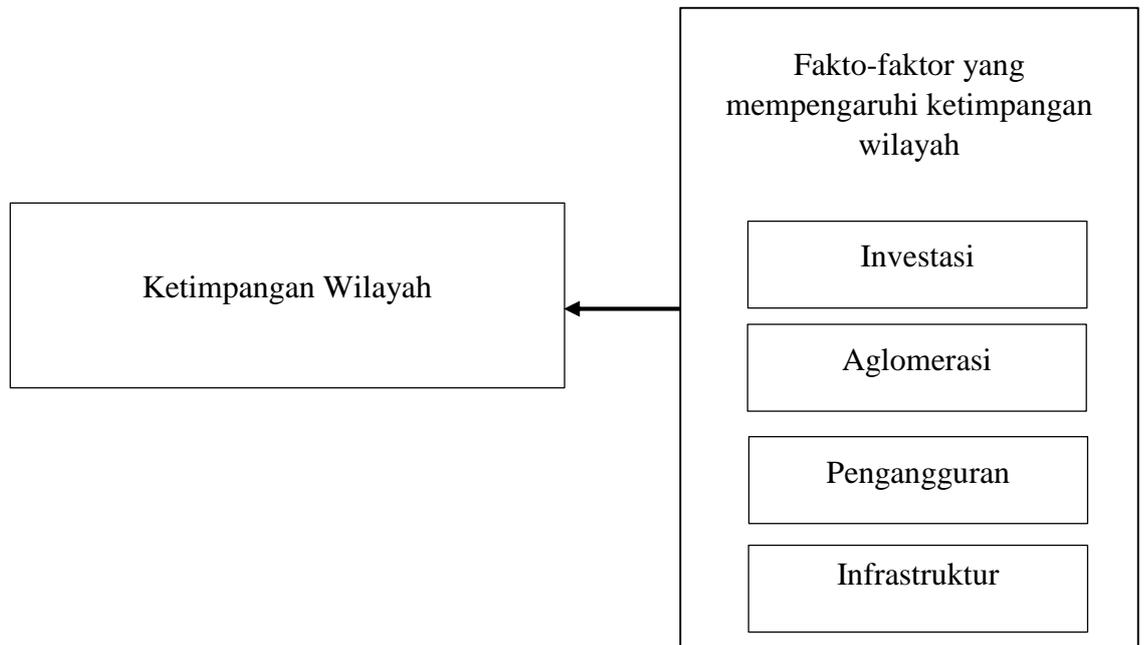
Investasi berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. Menurut Myrdal (Jhingan, 1993), investasi akan cenderung menambah ketidakmerataan. Pada wilayah yang sedang berkembang, permintaan barang dan jasa maka akan mendorong naiknya investasi yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan pada daerah tersebut, kemudian keadaan sebaliknya yaitu pada wilayah yang kurang berkembang, investasi akan cenderung rendah karena pendapatan masyarakatnya juga rendah.

Menurut Jamie Bonet (2006), aglomerasi yaitu pemusatan aktifitas produksi digunakan sebagai salah satu variabel yang digunakan untuk mengetahui

ketimpangan antar wilayah. Aglomerasi produksi dapat mempengaruhi kesenjangan wilayah secara langsung, yaitu pada saat terjadinya hambatan mobilitas tenaga kerja antar wilayah, atau saat terjadi surplus tenaga kerja dalam perekonomian.

Tingginya tingkat pengangguran akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas suatu wilayah, sehingga akan menyebabkan produktivitas suatu wilayah tidak optimal dan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut tertinggal dengan wilayah lainnya. Melihat kondisi demografis dari sisi tingkat pengangguran di suatu daerah, tingkat pengangguran yang tinggi akan menyebabkan ketimpangan yang tinggi pula (Syafrizal, 2008).

Berdasarkan teori Stone maupun Grigg menyebutkan bahwa infrastruktur memiliki pengaruh pada aspek sosial, antara lain mampu meningkatkan pemerataan, sedangkan hasil pada penelitian ini menunjukkan pembangunan infrastruktur tidak berpengaruh terhadap pemerataan ekonomi dan berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Lopez dalam Sari (2011) juga menyatakan bahwa perbaikan di sektor infrastruktur dapat mendorong pemerataan yang progresif, artinya pembangunan infrastruktur seharusnya dapat mempengaruhi pemerataan ekonomi negara.



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis yang digunakan adalah dugaan sementara atau jawaban sementara dan masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel investasi diduga mempunyai pengaruh positif terhadap ketimpangan antar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Variabel aglomerasi diduga mempunyai pengaruh positif terhadap ketimpangan antar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
3. Variabel tingkat pengangguran diduga mempunyai pengaruh positif terhadap ketimpangan antar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

4. Variabel infrastruktur diduga mempunyai pengaruh positif terhadap ketimpangan antar wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.